

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perkebunan dan pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, pada tahun 2020 sektor ini memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 13.7 persen, dan merupakan urutan kedua terbesar dalam penyumbang PDB di Indonesia setelah industri pengelolaan. Salah satu komoditas unggulan perkebunan adalah kelapa sawit, hal ini dapat dilihat dari data BPS Kelapa Sawit pada tahun 2019 hingga 2021 dimana luas perkerkebunan kelapa sawit pada tahun 2019 seluas 14.456.611 ha dan pada tahun 2021 seluas 15.081.021 ha atau luasnya meningkat sebesar 10,4 persen dalam kurun waktu dua tahun. Pertambahan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga mendorong terjadinya peningkatan produksi sawit/ CPO dimana pada tahun 2019 produksi sawit di Indonesia sebanyak 47.120.070 ton dan terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 49.710.345 ton atau meningkat 9,4 persen. Hal ini juga yang mendorong Indonesia menjadi negara pengekspor minyak sawit/CPO terbesar di dunia dengan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada tahun 2019 mencapai 36,17 juta ton besarnya hasil kelapa sawit di Indonesia membuat Indonesia mampu berkontribusi total ekspor CPO sebesar 36,87 persen.

Besarnya kontribusi Indonesia terhadap komoditas kelapa sawit memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sejarah perkebunan di Indonesia.

Hal ini mendorong terjadinya perluas perkebunan kelapa sawit mulai dari perkebunan milik negara, perkebunan rakyat dan perkebunan milik swasta. Perluasan perkebunan kelapa sawit terus berkembang di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Angkola Selatan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Angkola Selatan merupakan kecamatan kedua terbesar setelah Kecamatan Muara Batang Toru yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit.

Dari data BPS Tapanuli Selatan luas perkebunan kelapa sawit di Angkola Selatan perkebunan milik rakyat seluas 417,50 ha dan produksi minyak sawit sebesar 4.312,50 ton dengan produktivitasnya sebesar 10,32 ton /ha. Namun untuk luas areal perkebunan milik swasta tidak diketahui secara pasti. Laju peningkatan luas perkebunan kelapa sawit tidak hanya diusahakan oleh perkebunan rakyat saja, faktanya luas perkebunan kelapa sawit terbesar diusahakan oleh perkebunan swasta dengan luas 7,94 juta ha pada tahun 2020. Dominasi perkebunan kelapa sawit milik swasta telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru, namun hal ini juga sebanding dengan terus terjadinya peningkatan kasus konflik agraria di Indonesia.

Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik agraria pada tahun 2021 ada 207 kasus, 74 kasus diantaranya adalah konflik agraria perkebunan. Konflik ini bisa terjadi akibat adanya kesenjangan sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam. Konflik agraria biasanya bersifat kronis, masif, meluas dan berdimensi hukum, sosial, politik serta ekonomi. Konflik agraria kerap terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan yang timpang terhadap kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan kegunaan tanah serta pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pemberian izin Hak Guna Usaha terhadap perusahaan tanpa kajian yang matang akan memberikan dampak buruk pada masyarakat disekitar perusahaan.

Dusun Binasari (Binaan Serikat Islam) merupakan dusun yang pernah berkonflik dengan perusahaan perkebunan sawit swasta. Dusun Binasari sendiri diresmikan oleh Bupati Tapanuli Selatan oleh Bapak Soaloon Siregar mewakili Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan. Dusun ini sudah ada sejak 1996. Jumlah awal penduduk dusun Binasari adalah 100 KK. Melalui Program Transmigrasi Lokal yang terdiri dari gabungan Anggota Transmigrasi Lokal, anggota kelompok Tani Napa dan anggota Serikat Islam. Awal mulanya masyarakat yang tinggal di Dusun Binasari di berikan izin untuk membuka lahan seluas kurang lebih 1.050 ha yang terbagi untuk lahan perumahan dan lahan pertanian atau perkebunan masyarakat. Dusun ini memiliki karakter tanah yang cenderung tanah basah karena dikelilingi anak-anak sungai, sehingga daerah ini merupakan daerah yang sesuai untuk lahan persawahan untuk tanaman padi tetapi lahan ini tidak hanya ditanami padi saja beberapa masyarakat juga menanam karet, kopi, kemiri, pisang dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu setelah berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT ANJ Agri Siais beberapa lahan masyarakat mulai di tanami kelapa sawit.

Pada tahun 2004 Bupati Tapanuli Selatan memberikan izin lokasi kepada PT Ondop Perkasa Makmur (ODP) untuk keperluan perkebunan kelapa sawit. PT ODP kemudian berganti akibat akuisisi menjadi PT ANJ Agri Siais (ANJAS). Pada tahun 2004 tanggal 28 Oktober Perusahaan ini telah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional. Akibat dari pemberian izin hak guna usaha kepada perusahaan tanpa kajian atau pertimbangan yang mendalam mengakibatkan beberapa dari masyarakat dusun Binasari yang memiliki lahan pertanian atau perkebunan diambil sebagian oleh perusahaan.

Akibat dari pengambilan lahan yang sudah di garap sejak tahun 1996 membuat masyarakat dusun marah dan puncaknya pada tahun 2006 masyarakat Dusun Binasari

melakukan demonstrasi ke kantor DPRD dan kantor Bupati Tapanuli Selatan yang menghasilkan nota Kesepahaman antara DPRD Tapanuli Selatan dan PT ANJ Agri Siais. Isi dari nota kesepahaman tersebut, disebutkan pihak perusahaan akan mengangkat warga sekitar lokasi HGU menjadi pekerja di perusahaan mereka termasuk mempertahankan area perumahan dan lahan perkarangan asli Dusun Binasari dan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) yang berada di sepanjang jalan antar batas luar HGU. Selanjutnya dalam nota kesepahaman tersebut, pihak perusahaan juga berjanji membangun kebun dengan pola kemitraan yaitu 2 ha untuk setiap keluarga selain itu pihak perusahaan juga berjanji akan menjalankan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan *Corporate Social Responsibilities* terhadap warga Binasari dan KTNA. Namun sampai saat ini pihak perusahaan belum menjalankan nota kesepahaman dengan baik. Hal ini juga menimbulkan perpecahan terhadap masyarakat Dusun Binasari dikarenakan pemberian luas lahan plasma yang tidak merata dan target pemberian lahan plasma yang salah sasaran.

Konflik antara masyarakat dengan perusahaan akan terus terjadi apabila pemerintah tidak berpihak terhadap masyarakat dan tidak melakukan kajian yang mendalam sebelum memberikan izin hak guna usaha kepada perusahaan swasta. Besarnya kontribusi Indonesia terhadap ekspor CPO tentu memberikan dampak yang baik terhadap pendapatan negara, namun hal ini apakah juga berdampak baik terhadap masyarakat yang ada di sekitar perusahaan perkebunan apabila lahan mereka diambil oleh perusahaan. Bergantinya komoditas pertanian dan perkebunan di Dusun Binasari dari bertanam padi dan karet menjadi kelapa sawit belum tentu memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat dan apakah hal ini sebanding dengan beberapa lahan masyarakat yang diambil oleh pihak perusahaan. Berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT ANJ Agri Siais akan memberikan dampak terhadap laju

transmigrasi dikarenakan meningkatnya lapangan pekerjaan, namun pembukaan lapangan pekerjaan ini tidak dirasakan oleh masyarakat Dusun Binasari. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan di Dusun Binasari yang merupakan dusun transmigrasi lokal dan merupakan masyarakat yang mengalami sengketa lahan perkebunan untuk melihat bagaimana pengaruh perusahaan PT ANJ Agri Siais terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setelah berdirinya perusahaan PT ANJ Agri Siais.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut jadi hal yang dapat diidentifikasi dari latar belakang penelitian ini adalah :

1. Peningkatan luas perkebunan kelapa sawit swasta menimbulkan konflik agraria antara masyarakat Dusun Binasari dan pihak perusahaan PT ANJ Agri Siais.
2. Terjadinya perubahan profesi pekerjaan masyarakat dari petani menjadi buruh tani harian lepas.
3. Pembagian lahan plasma yang tidak kepada masyarakat menimbulkan kecemburuan terhadap sesama masyarakat Dusun Binasari.
4. Perubahan kepemilikan lahan pertanian dan perkebunan dari milik masyarakat menjadi milik perusahaan PT ANJ Agri Siais menimbulkan perubahan pada sosial dan ekonomi masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka Batasan masalah pada penelitian ini adalah konflik agraria pada masyarakat Dusun Binasari terhadap PT ANJ Agri

Siais menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan lahan pertanian dan perkebunan hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dan ekonomi di Dusun Binasari.

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari batasan permasalahan yang digambarkan, maka makna permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Binasari yang terkena dampak pengambilan lahan pertanian oleh pihak perusahaan PT ANJ Agri Siais.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dari kehadiran PT ANJ Agri Siais terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat Dusun Binasari Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Menjadi informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang berkepentingan dampak perusahaan perkebunan terhadap masyarakat.
- b. Bahan referensi mengenai geografi sosial dan geografi ekonomi

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten

Sebagai bahan pertimbangan pemberian izin Hak Guna Usaha terhadap perusahaan perkebunan

- b. Bagi masyarakat

Pembangunan perusahaan perkebunan di kawasan penduduk bisa menjadi peluang usaha karena meningkatnya aktivitas ekonomi